

BAB I

PENDAHULUAN

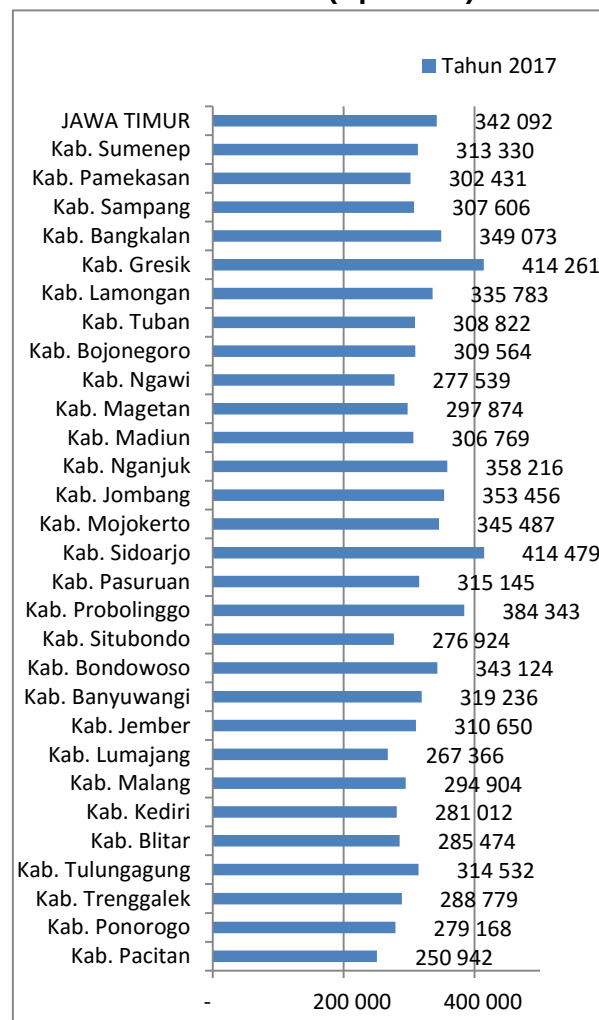
1.1 Latar Belakang

Indonesia menempati urutan keempat pada daftar jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan jumlahnya yang mencapai 261.890,9 jiwa. Jumlah penduduk Indonesia yang tinggi membuat rentan terhadap masalah ekonomi yang berdampak pada kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai dengan rendahnya kualitas hidup, dan berakibat pada rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Angka kemiskinan di Indonesia pada September 2017 mencapai 26,58 jiwa yang berarti sekitar 10,12 persen penduduk Indonesia. Kemudian turun sebesar 633,2 ribu penduduk pada Maret 2018 mencapai 25,95 juta jiwa, yang berarti sekitar 9,82 persen penduduk Indonesia secara keseluruhan (Badan Pusat Statistik, 2018). Artinya angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia masih terbilang tinggi, sebesar 9,82 persen penduduk Indonesia termasuk penduduk miskin.

Secara khusus, kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan atau konsumsi setiap individu dengan beberapa standart yang ditetapkan, mereka dianggap miskin apabila pendapatan atau konsumsi mereka berada dibawah standart tersebut menurut World Bank (dalam Haughton, 2012). Begitu pula menurut Badan Pusat Statistik (2010) penduduk miskin adalah penduduk yang berada dibawah suatu batas tertentu, yang disebut batas miskin atau garis kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, individu dapat dikatakan hidup sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal sebesar 2.100 kalori perhari.

Pada ukuran tersebut, maka batas miskin untuk makanan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan individu dalam sebulan, agar dapat memenuhi kebutuhan energinya sebesar 2.100 kalori perhari. Agar individu dapat hidup layak, pemenuhan kebutuhan makanan saja tidak akan cukup, oleh karena itu perlu juga dipenuhi akan kebutuhan bukan makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Grafik 1.1 Garis Kemiskinan dan Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2017 (Rp/Bulan)

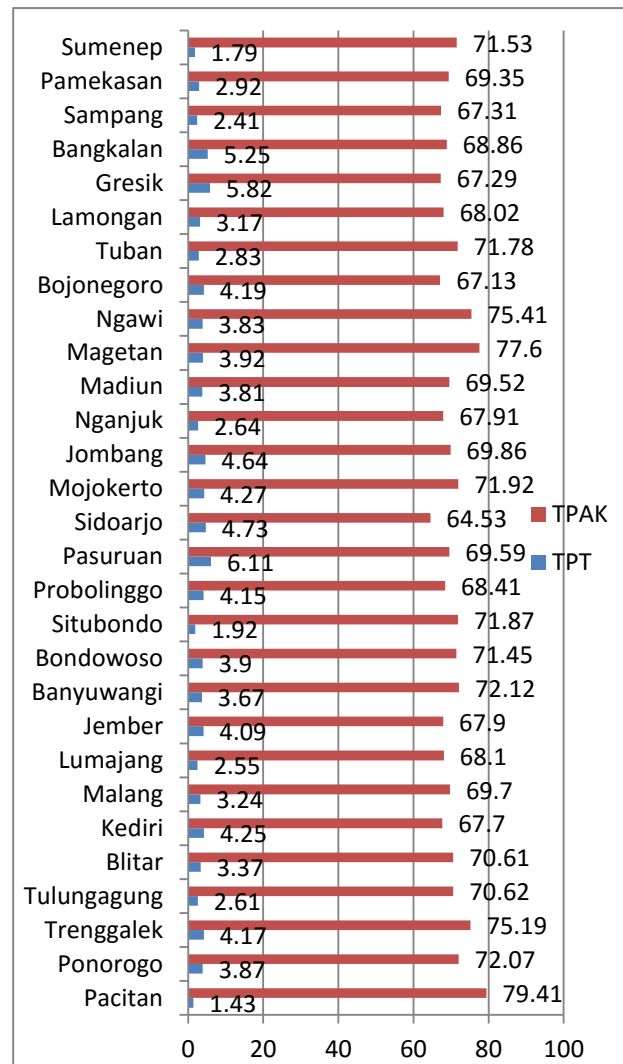


Sumber: Badan Pusat Statistik (Susenas Maret)

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Bangkalan yang merupakan kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi kedua sebesar 21,32 persen pada tahun 2017 setelah Kabupaten Sampang dengan angka kemiskinan sebesar 23,56 persen di Provinsi Jawa Timur. Dalam menghitung kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan). Diketahui bahwa dari grafik diatas menunjukkan garis kemiskinan Kabupaten Bangkalan sebesar 349.073 rupiah perbulan, angka tersebut termasuk angka tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

Tingginya kemiskinan pada Kabupaten Bangkalan salah satunya disebabkan oleh tingkat pengangguran yang masih tinggi. Pengangguran dapat mengakibatkan menurunnya kualitas hidup karena ketiadaan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan sehingga dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin menurut Todaro (dalam Latifah, 2017). Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pengangguran dan penduduk miskin. Pengangguran juga bisa diakibatkan oleh kualitas sumber daya manusia yang rendah yang tidak mampu kemudian tersisih pada kompetisi pasar yang modern saat ini. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia. Rendahnya indeks pembangunan manusia akan berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Latifah, 2017).

Grafik 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2018



Sumber: BPS (Survei Angkatan Kerja Nasional)

Angka pengangguran di Kabupaten Bangkalan relative tinggi, dilihat dari grafik diatas bahwa tingkat pengangguran Kabupaten Bangkalan paling tinggi di Provinsi Jawa Timur. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2017 menunjukkan tingkat pengangguran di Kabupaten Bangkalan mencapai angka 494.269 jiwa atau sebesar 4,48 persen. Tingkat pengangguran terbuka merupakan jumlah

pengangguran pada usia produktif di wilayah tersebut. Seharusnya Kabupaten Bangkalan sebagai kabupaten penyangga Surabaya yang memiliki potensi besar dengan adanya jembatan suramadu, yang secara geografis Kabupaten Bangkalan berada diposisi pintu gerbang madura dapat menjadi barometer (alat ukur) pembangunan di pulau Madura.

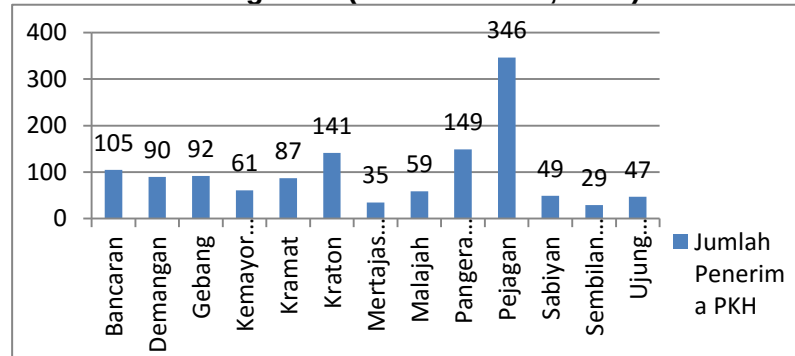
Kebijakan dalam meningkatkan penanggulangan kemiskinan, pemerintah Indonesia melaksanakan PKH (Program Keluarga Harapan) pada tahun 2007. Target Program Keluarga Harapan tersebut bukan saja keluarga miskin yang mempunyai komponen kesehatan, pendidikan, namun juga keluarga dengan komponen disabilitas dan lanjut usia. Tujuan PKH (Program Keluarga Harapan) dalam jangka pendek adalah memberikan *income effect* melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Sementara tujuan jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan rumah tangga miskin melalui peningkatan kualitas kesehatan/ nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan (Kemensos, 2019). Program bantuan PKH merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan yang diharapkan terjadi perubahan yang lebih baik dari kondisi awal, sehingga masyarakat mampu membebaskan kehidupannya dari keterbelakangan, kebodohan, ketidakberdayaan dan kemiskinan (Chambers dalam Sukei, 2015)

Sasaran PKH (Program Keluarga Harapan) yang diatur dalam Permensos Nomor 1 tahun 2018 Pasal 5 yang menyebutkan “Sasaran PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/ atau kesejahteraan sosial. Aspek pendidikan

merupakan investasi yang penting, karena investasi pada bidang ini merupakan pembangunan dibidang lainnya, seperti pada bidang kesehatan dan ekonomi menurut Badan Pusat Statistik (dalam Khairunnisa, 2014). Manusia yang berpendidikan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar dapat hidup lebih lama. Tidak hanya itu, manusia yang berpendidikan juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan pendapatan yang layak. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka.

Data pada angka partisipasi sekolah penduduk miskin Kabupaten Bangkalan menurut golongan umur (persen) tahun 2016 menunjukkan bahwa pada tingkat SMP (kelompok umur 13-15 tahun) sudah mencapai 100 persen. Sementara pada tingkat SD (kelompok umur 7-12 tahun) mencapai 94,13 persen. Artinya masih 5,87 persen yang harus dikejar untuk pendidikan tingkat SD (Badan Pusat Statistika, 2016). Adanya bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) pada komponen pendidikan diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk miskin. Investasi pada bidang pendidikan akan memberikan kesempatan pendidikan yang merata kepada masyarakat sehingga sumberdaya manusia andal semakin bertambah. Meningkatnya pada bidang pendidikan akan mendorong meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, yang nantinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memajukan prekonomian masyarakat berupa bertambahnya kesempatan kerja dan berkurangnya kemiskinan Faguet dan Sanchez (dalam Khairunnisa, 2015).

Grafik 1.3 Jumlah Penerima PKH di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan (Januari-Maret, 2019)



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2019 (data diolah)

Adanya penambahan keluarga penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan), berarti masih terdapat rumah tangga miskin pada Kelurahan Pejagan. Penambahan atau pengurangan penerima bantuan pemerintah disesuaikan dengan kondisi rumah tangga yang penerima. Pada penelitian ini memilih di Kecamatan Bangkalan, karena jumlah penduduk yang menerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) lebih banyak dibandingkan di Kecamatan Kamal. Padahal Kecamatan Bangkalan merupakan wilayah perkotaan di Kabupaten Bangkalan.

Kajian-kajian mengenai keberhasilan implementasi PKH (Program Keluarga Harapan) dalam memastikan standart hidup rumah tangga miskin tetap relatif terjaga ditengah *economi shock* sudah banyak dilakukan, dan temuan yang ada menunjukkan bahwa kehidupan yang dirasakan oleh rumah tangga miskin berdampak positif. Pada sebuah studi yang dilakukan oleh Bank Dunia (dalam kemensos, 2015), mengkonfirmasi bahwa PKH (Program Keluarga Harapan) memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima bantuan tunai. Penerima PKH (Program Keluarga Harapan)

memanfaatkan kelebihan uang tunai yang mereka miliki untuk membeli makanan yang lebih baik, serta untuk menunjang kesehatan mereka. Penyimpangan pemanfaatan alokasi untuk hal yang tidak produktif, seperti untuk membeli rokok tidak cukup signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pradipta & Sugeng, 2010 mengenai Gaya Hidup Konsumtif Penerima Bantuan PKH (studi di Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) memiliki gaya hidup konsumtif yang dapat dilihat dari kepemilikan harta benda mereka. Hasil penelitian menyatakan bahwa dana yang diperoleh dari program bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dimanfaatkan untuk menunjang gaya hidup mereka untuk membeli barang mewah, dikarenakan *hipperealitas* dan *simulacra* yang didapat dari pengaruh iklan televisi serta rasa tidak ingin kalah saing dengan tetangga mereka yang mayoritas bekerja sebagai TKI. Hal tersebut berarti, gaya hidup penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) di Desa Rejosari lebih mengikuti perkembangan teknologi dan mengutamakan nilai simbolik dari barang dan jasa yang dikonsumsi.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maya (2018) mengenai Konsumsi Daging Sapi dan Daging Ayam Pada Rumah Tangga Penerima PKH (Program Keluarga Harapan). Hasil penelitian menyatakan bahwa ada perbedaan antara konsumsi daging ayam dan daging sapi pada rumah tangga penerima PKH dan rumah tangga non PKH. Hasil penelitian diketahui, proporsi pengeluaran pangan total rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan lebih tinggi untuk

mengonsumsi daging ayam dibandingkan mengonsumsi daging sapi. Sebaliknya, pada rumah tangga non PKH konsumsi daging sapi lebih tinggi daripada mengonsumsi daging ayam.

Pola konsumsi pada rumah tangga merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Menurut Sawidak (dalam Ilmawan, 2013) menyatakan bahwa kesejahteraan merupakan sebuah kepuasan yang diperoleh oleh seseorang dari hasil mengonsumsi pendapatan yang diterimanya. Menurut Ilmawan (2013) menyatakan bahwa dalam menetapkan kesejahteraan keluarga serta cara pengukurannya merupakan hal yang sulit untuk dirumuskan secara tuntas, hal ini disebabkan permasalahan keluarga sejahtera bukan hanya menyangkut permasalahan pada bidang tertentu saja melainkan menyangkut berbagai bidang dalam kehidupan yang kompleks, dan dengan sulitnya mencari data yang akurat mengenai keluarga sejahtera maka pendekatan yang sering digunakan adalah melalui pendekatan pengeluaran rumah tangga, hal ini menandakan semakin tinggi pengeluaran rumah tangga maka keluarga tersebut semakin sejahtera, begitu pula sebaliknya semakin rendah pengeluaran rumah tangga maka tingkat kesejahteraan rumah tangga semakin rendah.

Berangkat dari hasil penelitian sebelumnya, bahwa setiap rumah tangga memiliki pola konsumsi yang berbeda-beda. Sehingga dengan adanya program bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) persiapan pemerintah untuk memenuhi target keluarga penerima yang sudah terdaftar, tentunya harus sesuai dengan tipikal masyarakat penerima. Masyarakat yang menerima PKH (Program Keluarga Harapan) tentunya tidak hanya dilihat dari segi geografis, namun kondisi sosial dan

kondisi ekonomi yang juga perlu dipertimbangkan agar sasaran PKH (Program Keluarga Harapan) sesuai capaian yang diinginkan. Program keluarga harapan ini sebagai salah satu program peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat miskin, maka penelitian ini memfokuskan pada pola perilaku konsumsi keluarga penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) untuk mengetahui penggunaan dana bantuan tersebut dalam memenuhi kebutuhannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “bagaimana pola perilaku konsumsi keluarga penerima PKH (studi Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan”.

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Suatu riset khusus dalam pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola konsumsi sebelum dan sesudah keluarga menerima bantuan PKH pada Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dalam menambah pengetahuan ilmu ekonomi khususnya tentang pengembangan terhadap teori konsumsi serta mengetahui bagaimana pola konsumsi masyarakat penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan).
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi dalam penelitian lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat digunakan bagi institusi sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH (Program Keluarga Harapan).
- b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengetahui pola konsumsi bagi masyarakat penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan sebagai bahan rekomendasi pihak terkait.